

Tajuk

Laju PHK Diganjal Bantuan Subsidi Upah

Dana program bantuan subsidi upah segera mengucur. Rencananya, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta pekerja nonesensial. Syaratnya, pekerja yang berhak menerima subsidi upah telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji Rp3,5 juta ke bawah per bulan. Selain itu, lokasi tempat kerjanya dalam cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 atau kritis sehingga dirumahkan, dan bukan yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karenaitu, pemerintah minta pengusaha tidak melakukan PHK, sebab tujuan utama program subsidi upah untuk mencegah terjadinya PHK.

Keputusan program bantuan subsidi upah dihadirkan menyusul perpanjangan PPKM Darurat. Dana yang siap digelontorkan Rp8,8 triliun berasal dari anggaran untuk program kerja dan bantuan subsidi upah Rp10 triliun. Adapun sisanya sebesar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk anggaran kartu pra-kerja. Dengan demikian, dana program kartu pekerja meningkat dari Rp20 triliun menjadi Rp21,2 triliun.

Pemerintah berharap dengan meningkatnya anggaran maka peserta kartu prakarya semakin bertambah. Bantuan subsidi upah diberikan selama dua bulan, masing-masing sebesar Rp500.000 dan akan diberikan sekaligus. Artinya, penerima bantuan subsidi upah tersebut sekaligus mendapat Rp1 juta per orang.

Dampak dari implementasi PPKM Darurat yang kini bersalin nama menjadi PPKM Level 3-4, setelah diperpanjang hingga 25 Juli mendatang, telah membuat tiarap terutama pelaku bisnis di bidang pusat perbelanjaan dan restoran. Saat ini, jumlah karyawan pusat perbelanjaan mencapai 280.000 orang, di luar karyawan dari pihak penyewa. Dari ratusan ribu karyawan itu, 30% sangat berpotensi terkena PHK atau sekitar 84.000 orang. Hitung-hitungan itu, oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI) Alphonus Widjaja adalah sebuah skenario terburuk. Bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan sebelum memutuskan PHK, sejumlah tahapan ditempuh terlebih dulu. Pertama, karyawan dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh. Kedua, dirumahkan dengan upah dibayar sebagian. Ketiga, jalan terakhir PHK. Saat ini, karyawan masih dalam tahap dirumahkan.

Bagaimana dengan pelaku usaha di bidang restoran? Setali tiga uang dengan pengusaha pusat perbelanjaan. Meminjam istilah dari Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin, napas pengusaha restoran sudah hampir habis. Begitu parahkah? Emil membeberkan sebuah data bahwa tahun lalu terdapat 1.033 restoran telah tutup permanen dan sebanyak 400 restoran tutup sementara di wilayah Jabodetabek. Dan, Emil meyakini 400 restoran yang sebelumnya tutup sementara, kini sudah tutup permanen, menyusul implementasi PPKM Darurat yang kini diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Sepanjang pandemi Covid-19 diperkirakan tak kurang dari 200.000 karyawan restoran terkena PHK.

Dalam laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD) yang dipublikasikan pada pertengahan bulan ini membeberkan bahwa akibat pandemi, sebanyak 22 juta orang di negara-negara kaya kehilangan pekerjaan. Laporan OECD tersebut tidak fokus pada angka pengangguran yang mencapai puluhan juta itu, tetapi lebih bersifat peringatan tentang risiko kenaikan jumlah pengangguran dalam jangka panjang. Pada akhir tahun lalu, sebagaimana dibebaskan dalam laporan OECD, jumlah pengangguran setidaknya dalam enam bulan meningkat sebesar 60% dibandingkan dengan tingkat prapandemi.

Kembali kepada program bantuan subsidi upah, sejumlah kalangan mempertanyakan mekanisme penyalurannya terutama yang menyaratkan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan mereka layak menerima bantuan subsidi upah? Pemerintah beralasan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akurat tabel dan valid. Melalui data BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah meyakini pemberian subsidi upah secara cepat dan tepat sasaran. Program bantuan subsidi upah bertujuan menghambat laju PHK akibat pemberlakuan PPKM Darurat yang diperpanjang dan semoga tepat sasaran. □



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

Kebenaran, Kebohongan, dan Jurnalisme



EDDY KOKO

Wartawan, Pengajar Jurnalistik di FISIP Universitas Sriwijaya Palembang

Winston Churchill, perdana menteri Inggris, itu termasuk orang yang percaya bahwa kebenaran mampu mengalahkan kebohongan. Dengan santai Churchill bilang, meskipun kebohongan sudah berlari kencang sementara kebenaran baru mengikat tali sepatunya, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Bagaimana dengan sekarang, saat kebohongan sudah lari kencang sekali berkendaraan media sosial (medsos) dengan dampak luar biasa, sementara kebenaran baru cari toko sepatu? Sialnya, saat maubayar, baru tahu dompetnya ketinggalan. Kebenaran, tampaknya, memang, sedang kedinginan, butuh bantuan, dan kepedulian banyak orang.

Mengapa kebenaran dapat mengalahkan kebohongan? Menurut budayawan Radhar Panca Dahana (alm), dalam *talkshow*

radio Polemik, Sabtu 15 Januari 2011, meskipun kebohongan punya *speed*, tetapi kebenaran memiliki *endurance*. Kebenaran memiliki tenaga yang tak kenal lelah dalam menutup kebohongan. Jadi, jangan pernah lelah mendorong kebenaran untuk lari menyusul kebohongan.

Kebohongan yang sekarang populer disebut hoaks, duluperlu waktu sampai kepada seseorang. Sekarang dalam hitungan detik menyebar ke ribuan, bahkan seantero dunia. Hoaks membuat masyarakat terbelah, pemerintah tak lagi dipercaya, sesama manusia saling curiga dan merontokkan kepercayaan kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Penelitian *Journal of Personality and Social Psychology* mengungkapkan, dalam sehari seseorang dapat melakukan kebohongan satu sampai dua kali.

Menarik pendapat psikolog Hamdi Muluk, suatu hari, sambil makan siang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, dia mengungkapkan, seorang psikopat yang suka berbohong, bahkan bangga hasil kebohongannya telah "sukses" merugikan orang banyak dan menipu bagian dari hidupnya, tetap marah jika dikatakan sebagai pembohong. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini nyaman dikatakan sebagai pembohong. Basis moralnya runtuh.

Terapi Jurnalisme

Peredaran hoaks di medsos sudah masuk kategori kondisi darurat dan merepotkan. Con-

tohnya, hoaks seputar Covid-19 di Indonesia yang menambah rumit penanganan dan pengendalian virus mematikan ini. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Indonesia mencatat, dalam sehari tidak kurang 200-250 informasi hoaks di medsos. Pada 2021, sejak Januari sampai awal Juli ada 1.695 isu Covid-19 hoaks ditemukan dan dipastikan terus berlanjut. Hoaks dikemas dengan gaya sangat meyakinkan sehingga penerimanya seakan terhipnosis, tanpa pikir panjang langsung meneruskan pesan secara berantai dan menjadi viral.

Pemerintah tidak diam melawan hoaks dengan melakukan sosialisasi melalui radio, televisi, surat kabar, sampai baliho raksasa di pinggir jalan agar masyarakat sadar serta selektif menerima informasi. Namun, semua itu belum membuahkan hasil menggembirakan karena hoaks masih berseliweran di medsos.

Persoalan berita bohong di hulu dan hilir tak kunjung berakhir, meskipun sudah dilakukan edukasi kepada masyarakat di wilayah tersebut. Banyak pelaku pembuat hoaks diringkus dan diadili, namun hoaks-hoaks baru viral dan muncul kembali.

Media jurnalistik sebagai penyampai kebenaran tampak kalah pamor. Medsos sudah bergerak cepat, sementara media jurnalistik masih memastikan tali sepatunya terikat dengan benar. Dalam kondisi kebohongan yang membingungkan, peran media jurnalistik sangat di-

butuhkan untuk membantu masyarakat mendapatkan kejelasan.

Media jurnalistik harus diakui relatif lamban dibanding medsos karena sebelum menjadi berita-informasi harus melalui aturan jurnalistik. Informasi yang masuk ke meja redaksi harus diverifikasi dulu kebenarannya, sehingga membutuhkan waktu untuk disiarkan. Medsos tak peduli aturan. Penerima pesan dari medsos dapat langsung unggah atau *share* tanpa verifikasi kebenarannya dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Pada media jurnalistik jelas siapa dan di mana pihak bertanggung jawab terhadap berita yang disiarkannya. Polisi harus melacak, mengurai simpul awal penyebaran berita bohong di medsos untuk sampai kepada orang yang bertanggung jawab.

Jurnalisme memiliki aturan dalam menyiarkan berita, seperti tidak menghakimi, asas praduga tak bersalah, menghormati keberimbangan dan yang utama adalah informasi harus diuji dulu kebenarannya. Sebagai institusi produksi dan penyebaran informasi jurnalisme berpegang pada etika, standar profesional, dan tanggung jawab dalam menghasilkan serta menyebarkan informasi. Prinsip inilah yang perlu menjadi budaya atau sistem nilai dalam era digital terkait penyebaran informasi. Meskipun dunia dan interaksi antara publik berubah, tetapi prinsip dasar jurnalisme tak

pernah berubah.

Kondisi masyarakat yang terkontaminasi medsos akut perlu segera disadarkan melalui terapi. Ada baiknya jurnalisme diperkenalkan sejak dini sebagai salah satu terapi kepada masyarakat luas agar bijak dalam bermedsos. Dulu ada majalah dinding di sekolah-sekolah yang sekarang berubah bentuk menjadi media *online*. Melalui kegiatan ini pengenalan jurnalistik bisa lebih ditekankan. Sayangnya, media sekolah sering tidak menarik sehingga siswa lebih banyak terhubung dengan media sosial, apakah itu Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Anak hidup dalam era informasi instan, tetapi tidak banyak mendapat pendidikan, bagaimana berkomentar di media dengan baik. Jurnalisme membantu mereka menuliskan komentar positif dalam *blog* sekaligus belajar bertanggung jawab atas media yang dikelolanya.

Pelajaran atau pengenalan jurnalistik di sekolah kepada siswa dapat disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti pendidikan informatika maupun bahasa Indonesia. Selain melalui pelajaran ekstrakurikuler media massa yang sudah dilakukan sejumlah sekolah dan lembaga pers atau media jurnalistik dan Dewan Pers dapat dilakukan sebagai penguatan materinya. Intinya, jangan sampai menyebar kebohongan yang kemudian hari menjadi budaya. □

Harapan Damai Muslim Balkan



SAIFUL MAARIF

Fungsional Asesor SDM Aparatur Kementerian Agama dan Pegiat Birokrat Menulis

Bosnia-Herzegovina memiliki sejarah kedekatan dengan Indonesia. Untuk memberi dukungan moral pada muslim Bosnia-Herzegovina, pada awal Maret 1995 Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan yang disebut sebagai perjalanan "kontrak mati". Disebut demikian karena kondisi Sarajevo saat itu masih cekam karena siasuasana peperangan yang belum selesai.

Kunjungan tersebut mengawali bantuan Indonesia dalam bentuk pembangunan Masjid Istiqlal Dzamiya bagi umat muslim Bosnia-Herzegovina, sekaligus dorongan Pemerintah Indonesia untuk keadilan dan perdamaian rakyat Bosnia-Herzegovina.

Bagi muslim Bosnia-Herzegovina, bulan Juli ini adalah penanda memori kelam penghapusan tentara Serbia selama tiga tahun pada 26 tahun lampau di Srebrenica. Upaya damai yang ikut diprakarsai Pemerintah Indonesia hingga kini menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Damai dan bayang-bayang sentimen konflik masih mewarnai Bumi Balkan. Sebagai kawasan yang masih relatif baru berdiri, negara-negara eks Yugoslavia berupaya maksimal untuk mengobati luka sejarah konflik rasial dan meredam beragam bibit masalah, dengan berbagai tantangan terkini. Salah satu tantangan nyatanya adalah opini media. Vonis Ratko Mladic, gembong genosida muslim Bosniak (sebutan kaum muslim Bosnia Herzegovina), oleh Pengadilan Kejahatan Perang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bulan lalu justru disambut gempita dukungan positif di Beograd.

Harian *Informir*, *Kurir*, dan *Vecernje Novosti* bergantian menyikapi vonis tersebut sebagai putusan tidak adil dan malah menempatkan Mladic sebagai pahlawan yang menjadi korban ketidakadilan dunia. Tentu saja aneh. Pasalnya, pada saat bersamaan, kantor berita BBC dengan tegas memberitakan Mladic sebagai "jagal muslim Bosnia". Pernyataan dan ke-

beranian media Serbia tersebut tentu tidak berdiri sendiri. Afirmasi tersebut sarat makna dan karenanya bukan *horstexte*, dalam banyak hal justru menjadi hantu perdamaian itu sendiri.

Titik Curiga

Hantu ini terus membayangi konsolidasi etnisitas dan negara-negara Balkan dalam bentuk kecurigaan, sinisme, provokasi, dan semacamnya. Selepas runtuhnya Yugoslavia pada 1992, negara-negara baru bermunculan di bekas kekuasaan Yugoslavia dalam kedaulatan Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Makedonia Utara, Slovenia, Montenegro, Kosovo-Vojvodina, dan Serbia.

Namun, meski tidak sebesar muslim Bosnia, memori kelam konflik antaretnis juga dialami muslim di Albania, Kroasia, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, dan sekitarnya, khususnya dalam konflik dengan etnis Serbia dalam bentuk *ethnic cleansing* dan beragam intimidasi fisik. Dalam posisi demikian, muslim Balkan justru kerap dikonstruksi menjadi titik curiga dan bahan dasar islamofobia di Eropa Tenggara, bahkan saat mereka adalah korban genosida itu sendiri sebagai manayangi dialami muslim Bosnia-Herzegovina dan Kosovo.

Di luar Asia dan Afrika, Balkan adalah rumah terbesar bagi kaum muslim dengan Dinasti Ottoman sebagai pembuka jalan dan peletak dasar nilai dan



membangun islamofobia. Bisa dipahami, posisi Balkan sebagai titik temu Eropa dan Asia sangat mungkin akan dinilai merepotkan banyak pihak dan kekuatan utama jika berkembang dengan optimal.

Stigma dan Harapan Damai

Secara umum, gerakan islamofobia di kawasan Balkan diinisiasi beberapa sumber. Pertama, gerakan yang dipelopori pandangan dan gerakan kelompok sayap kanan. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dapat dikatakan berada di garis depan dalam menyuarkan penolakan dan tuduhan negatif pada muslim Balkan. Karena masih berupa negara-negara muda yang mengalami masalah perbatasan dan etnisitas, negara-negara Balkan tetap mengalami masalah pengungsi di beberapa negara.

Terhadap pengungsi muslim Balkan yang mencari suaka, misalnya, Orbán dengan lantang menyatakan penolakan dan mengatakan mereka sebagai perusuh peradaban Nasrani dan Yahudi. Pandangan Orbán jelas destruktif untuk ide perdamaian. Ujaran tersebut juga tidak bisa

disepelekan, bukan hanya karena disampaikan seorang pimpinan pemerintahan di Eropa Timur, tapi juga karena kematangan dan kedewasaan berbangsa dan bernegara negara-negara eks Yugoslavia masih rentan dan rawan konflik.

Kedua, pembiaran dan pengabaian sentimen publik. Pemberian Hadiah Nobel bidang Sastra bagi Novelis Austria Peter Handke pada 2019 menimbulkan gelombang penolakan besar di kalangan muslim Balkan. Pasalnya, Handke secara nyata memberi dukungan pada Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, serta menolak adanya genosida muslim Bosnia. Pemberian Nobel ini jelas melukai perasaan warga muslim Balkan karena sama halnya memberi apresiasi dan dukungan terhadap keseluruhan pandangan Handke.

Namun, penolakan warga muslim Balkan tidak digubris. Dalam konteks yang sama, pandangan Handke mengenai tragedi muslim Bosnia sebagian dengan ide pemikir bahasa terkemuka Noam Chomsky dalam *Yugoslavia, Peace, War, and Dissolution* (2018). Keduanya mewakili pandangan banyak pemikir dan sejarawan yang mengabaikan fakta genosida dan acuh tak acuh pada sentimen muslim Balkan yang *ta'awun* pada upaya mem-

bangun solidaritas dan kebersamaan antaretnis dan antaragama.

Di Sarajevo, ibu kota Bosnia-Herzegovina, misalnya, niat dan upaya membangun toleransi itu terlihat nyata. Sebagaimana laporan *International Religious Freedom 2021* yang dirilis Pemerintah Amerika Serikat, dengan populasi 51% lebih muslim Sunni, muslim Bosnia bahu membahu membangun kehidupan beragama yang yubud dengan umat Gereja Ortodoks Roma, Gereja Ortodoks Serbia, dan Yahudi.

Kebersamaan ini sejalan dengan catatan positif peringkat Bosnia Herzegovina pada *Global Peace Index (GPI) 2020* yang dilansir Institute for Economics and Peace. Didukung regulasi toleransi beragama yang relevan, muslim Bosnia berkontribusi besar dalam capaian *ranking* 72 GPI, dengan tren positif dari capaian sejenis sebelumnya.

Narasi kebersamaan dan capaian positif muslim Bosnia rasanya terlalu naif jika harus berhadapan dengan kepentingan sempit dan pandangan separatis mengenai islamofobia di Balkan. Sebaliknya, muslim Balkan telah menunjukkan niat dan tindakan konstruktif untuk kehidupan beragama dan semangat toleransi yang demikian positif. □